BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Pengendalian Intern

2.1.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Menurut Hery (2013:15), menyatakan bahwa definisi Sistem Pengendalian Intern sebagai berikut:

> "Sistem pengendalian intern adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan".

Sedangkan menurut Mahmudi (2011:252) menyatakan bahwa definisi Sistem Pengendalian Intern adalah:

> "Sistem pengendalian interen adalah suatu proses pengendalian yang melekat pada tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh karyawan yang dilakukan bukan hanya bersifat insidental dan responsive atas kasus tertentu saja tetapi bersifat terus menerus".

Menurut Mulyadi (2014:163) menyatakan bahwa definisi Sistem Pengendalian Intern adalah sebagai berikut:

"Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong terjadinya kebijakan manajemen".

Dan Menurut Numalia Hasanah dan Achmad Fauzi (2016:181) pengertian sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut:

> "Sistem pengendalian intern adalah suatu proses integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan, pelaporan keuangan, pengelolaan, pengamanan aset negara dan ketaatan peraturan perundang-undangan".

Dengan kemudian dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern merupakan proses dan kegiatan organisasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong terjadinya kebijakan manajemen untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan, pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya penerapan sistem pengendalian intern secara ketat maka diharapkan bahwa seluruh kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik. Bahkan tidak hanya dari segi operasional saja yang akan berjalan dengan tertib dan baik sesuai prosedur, akan tetapi dari segi finansial juga dapat lebih termonitor dengan baik.

2.1.1.2 Indikator Sistem Pengendalian Intern

Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2013:128) Istilah *"internal control"* yang digunakan ISA 315 lebih luas dari sekadar kegiatan pengendalian (*control activities*) seperti pemisahan tugas (*segregation of duties*), proses otorisasi

(*authorizations*), dan rekonsiliasi saldo. Pengendalian internal dalam ISA 315 terdiri atas lima indikator, yaitu:

1. *"Control Environment* (Lingkungan Pengendalian)
2. *Risk Assessment* (Penilaian Resiko)
3. *Information System* (Sistem Informasi)
4. *Control Activities* (Kegiatan Pengendalian)
5. *Monitoring* (Pemantauan)".

Berdasarkan indikator diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Control Environment* (Lingkungan Pengendalian)

   Lingkungan pengendalian merupakan dasar bagi pengendalian internal yang efektif. Hal tersebut memberikan disiplin dan struktur bagi entitas. Hal tersebut menjadi penunjuk arah *(it sets the tone)* bagi entitas, membuat karyawan sadar akan pengendalian *(control consciousness)* dalam organisasi itu. Lingkungan pengendalian berurusan dengan fungsi pengelolaan *(management)* dan pengawasan *(governance)* ditingkat tertinggi dalam entitas itu. Ia juga mengatur sikap, perilaku, kesadaran, berpengalaman, serta tindakan manajemen dan *Those Charge With Governance* (TCWG) mengenai pengendalian internal entitas itu. Pengendalian dalam lingkungan pengendalian bersifat *pervasive*. Pengendalian ini tidak secara langsung mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi salah saji yang material dalam laporan keuangan. Pengendalian ini menjadi dasar bagi seluruh komponen pengendalian internal lainnya. Pengendalian dalam komponen lingkungan pengendalian yang bersifat *pervasive* ini mempengaruhi penilaian auditor terhadap kegiatan pengendalian tertentu.

2. *Risk Assessment* (Penilaian Resiko)

   Istilah *risk assessment* atau penilaian resiko dapat dilihat dari sisi entitas dan auditor. Entitas menilai resiko dari sudut pandang ancaman terhadap pencapaian tujuan entitas; diantaranya, ialah menghasilkan laporan keuangan yang bebas dari salah saji yang materil. Untuk itulah entitas wajib merancang, mengimplementasikan, dan memelihara pengendalian internal.

3. *Information System* (Sistem Informasi)

   Manajemen dan *Those Charge With Governance* (TCWG) memerlukan informasi yang andal untuk:
   a. Mengelola entitas, seperti perencanaan *(Planning),* penganggaran *(budgeting),* pemantauan kinerja *(monitoring performance),*

pengalokasian sumber daya *(allocating resources),* penetapan harga *(pricing),* dan pembuatan laporan keuangan.

b. Mencapai tujuan entitas; dan
c. Mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi faktor risiko.

Ini semua memerlukan informasi yang tepat. Informasi seperti itu harus diidentifikasi, direkam, dan dikomunikasikan atau disebarkan secara tepat waktu kepada karyawan disegala tingkat, yang memerlukannya untuk membuat keputusan. Suatu sistem informasi meliputi infrastruktur (komponen fisik dan perangkat keras), perangkat lunak, manusia, prosedur dan data. Banyak sistem informasi memanfaatkan IT *(information technology).* Sistem informasi mengidentifikasi, merekam, dan menyebarkan informasi untuk mendukung tercapainya tujuan pelaporan keuangan dan tujuan pengendalian internal.

4. *Control Activities* (Kegiatan Pengendalian)

Kegiatan – kegiatan pengendalian *(control activities)* adalah kebijakan dan prosedur yang memastikan bahwa petunjuk dan arahan manajemen *(management's directivies)* dilaksanakan. Kegiatan pengendalian dirancang untuk menanggulangi risiko yang bisa terjadi dalam kegiatan sehari-hari seperti pengolahan transaksi (penjualan, pembelian, pembayaran, dan transaksi lainnya), dan pengamanan aset *(safeguarding of assets).*

5. *Monitoring* (Pemantauan)

Komponen pemantauan, menilai efektifnya kinerja pengendalian internal dengan berjalannya waktu. Tujuannya ialah untuk memastikan bahwa pengendalian berjalan sebagaimana harusnya, dan jika tidak, maka tindakan perbaikan *(corrective actions)* diambil.

2.1.1.3 Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian inten harus diterapkan dengan baik jika ingin dicapai esensinya, dan untuk itu perlu diterapkan bahwa manajemen puncaklah yang memiliki peran terbesar disini. Adapun tujuan dari sistem pengendalian intern menurut Numalia Hasanah dan Achmad Fauzi (2016:181) sebagai berikut:

1. Untuk melindungi aset (termasuk data) negara.
2. Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat.
3. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat,relevan dan andal.
4. Untuk menjamin bahwalaporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP).

5. Untuk efisiensi dan efektifitas operasi.

2.1.2 Komitmen Organisasi

2.1.2.1 Pengertian Komitmen Organisasi

Menurut Gibson, Ivancevich, Donnelly, dan Konopaske (2012:182) (dalam Wibowo 2016: 430), menyatakan bahwa definisi komitmen organisasi adalah:

> "Perasaan identifikasi, loyalitas, dan pelibatan dinyatakan oleh pekerja terhadap organisasi atau unit dalam organisasi".

Sedangkan menurut Porter *et.al* (dalam Darmawan, 2013:168) Komitmen organisasi adalah:

> "Kuatnya pengenalan dan keterlibatan seseorang dalam suatu organisasi tertentu. Komitmen keberpihakan anggota organisasi terhadap organisasinya serta terlibat aktif dan berkontribusi terhadap organisasinya. Dengan komitmen yang tinggi akan menimbulkan rasa memiliki, sehingga ada keterikatan anggota dengan organisasinya".

Menurut Colquitt LePine dan Weeon, 2015 (dalam Wibowo 2016:430):

> "Komitmen Organisasi didefinisikan sebagai keinginan pada sebagian pekerja untuk tetap menjadi anggota organisasi."

Berdasarkan definisi diatas bahwa komitmen organisasi merupakan perasaan identifikasi, loyalitas, dan pelibatan yang dilakukan oleh pekerja terhadap suatu organisasi dan keinginan pada pekerja untuk tetap menjadi anggota organisasi.

2.1.2.2 Indikator Komitmen Organisasi

Menurut Colquitt, LePine dan Wesson, 2015 (dalam Wibowo 2016:432) mempunyai indikator tentang komitmen organisasi yaitu *Affective commitment, Continuance commitment dan Normative commitment.*

Adapun penjelasan indikator komitmen organisasi yaitu sebagai berikut:

a. Affective commitment

Komitmen afektif mengacu pada keterikatan emosional, identifikasi serta keterlibatan seorang karyawan pada suatu organisasi. Di dalam organisasi diperlukan sumber daya manusia yang memiliki peran penting sebagai penggerak demi kelancaran jalannya suatu organisasi. Seseorang yang bergabung dalam organisasi dituntut adanya komitmen dalam dirinya. Pada dimensi ini karyawan mengidentifikasikan dirinya dengan organisasi dan loyal terhadap organisasi. Komitmen afektif seseorang akan menjadi lebih kuat bila pengalamannya dalam suatu organisasi konsisten dengan harapan-harapan dan memuaskan kebutuhan dasarnya dan sebaliknya. Karyawan dengan komitmen yang tinggi dapat diharapkan akan memperlihatkan kinerja yang optimal. Komitmen afektif pun menunjukkan kuatnya keinginan seseorang untuk terus bekerja bagi suatu organisasi karena ia memang setuju dengan organisasi itu dan memang berkeinginan melakukannya. Komitmen afektif menjelaskan seberapa jauh seorang karyawan secara emosi terikat, mengenal dan terlibat dalam organisasi. Dengan demikian, karyawan yang memiliki komitmen afektif akan kuat terus pada organisasi.

b. Continuance commitment

Dibandingkan dengan komitmen afektif, *continuance commitment* ini lebih terbuka. *Continuance commitment* berkaitan dengan konsep *side-bets orientation* yang menekankan pada sumbangan seseorang yang sewaktu-waktu dapat hilang jika orang itu meninggalkan organisasi. Tindakan meninggalkan organisasi menjadi sesuatu yang beresiko tinggi karena orang merasa takut akan kehilangan sumbangan yang mereka tanamkan pada organisasi itu dan menyadari bahwa mereka tak mungkin mencari gantinya. Komitmen ini lebih menjelaskan persepsi karyawan tentang kerugian yang akan dihadapinya jika ia meninggalkan organisasi.

c. Normative commitment

Komitmen normatif menunjukkan kepada tingkat seberapa jauh seseorang secara psikologis terikat untuk menjadi karyawan dari sebuah organisasi

yang didasarkan kepada perasaan seperti kesetiaan, afeksi, kehangatan, pemilikan, kebanggaan, kebahagiaan, dll. Memiliki kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi merupakan hal yang seharusnya dilakukan, pengalaman sosial selama dalam organisasi dan tanggungjawab atas pekerjaan.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.

Menurut Hery (2012:3) laporan keuangan adalah sebagai berikut:

> "Laporan Keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitasnya perusahaan kepada pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan merupakan alat yang menghubungkan perusahaan atau pemerintah daerah dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan maupun pemerintahan dan kinerja perusaahan ataupun pemerintah daerah."

Sedangkan Menurut V.Wiratna Sujarweni (2017:1) Laporan keuangan adalah:

> "Catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada satu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan."

Menurut Afiyah (2010:164) laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berkut:

> "Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan hasil proses akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yang dilaksanakan sebelumnya yaitu tahap pengidentifikasian dokumen, tahap penjurnalan, dan tahap posting ke buku besar masing-masing akun."

Dari definisi-definisi tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan proses pencatatan informasi keuangan meliputi tahap pengidentifikasian, penjurnalan, posting ke buku besar pada satu periode yang digunakan sebagai alat untuk mengomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak yang berkepentingan. Laporan keuanganpun harus memiliki informasi yang lengkap agar dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Menurut Erlina (2015:25) kualitas laporan keuangan pemerintah adalah:

> "Suatu hasil dari proses pengindentifikasian, pengukuran, pencatatan dan transaksi ekonomi yang menyatakan aktifitas yang berhubungan dengan uang dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintahan yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan."

2.1.3.2 Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Adapun indikator kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menurut Erlina, dkk (2015:8), yaitu:

1. Relevan

   Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan, yaitu:
   a) Memiliki manfaat umpan balik *(feedback value).* Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu
   b) Memiliki manfaat prediktif *(predictive value).* Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini

c) Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan
d) Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu:

a) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan
b) Dapat diverifikasi *(verifiability).* Informasi disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh
c) Netralitas, Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tetentu.

4. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ketahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

5. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna

diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2010:27) menyatakan:

> "Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi didalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah".

Menurut Mahmudi (2007:27) :

> "Menyatakan terdapat hubungan terkait antara Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan adalah untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah, sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang pengendalian intern, kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah".

Berdasarkan pemaparan diatas tentang pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern yang baik dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya hasil penelitian sebelumnya Liziana Widari dan Sutrisno (2017), menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini membuktikan bahwa jika pengendalian intern dilakukan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Menurut Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, Anantawikrama Tungga Atmadja dan Nyoman Ari Surya Darmawan (2014) mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat penerapan sistem pengendalian internal maka akan semakin tinggi tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini pun sejalan dengan penelitian menurut Ida Ayu Enny Kinarayati dan Ni Made Adi Erawati (2016) menyimpulkan bahwa pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

2.2.2 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Kreitner dan Kinicki (2014:166):

> "Komitmen organisasi *(organizational commitment)* mencerminkan tingkatan dimana seseorang mengenali sebuah organisasi dan terikat pada tujuan-tujuannya. Tercapainya suatu tujuan organisasi dipengaruhi oleh para pekerja yang memiliki loyalitas pada perusahaan".

Menurut Soekidjan (2009:201):

> "Komitmen organisasi merupakan suatu perilaku sumber daya manusia selaku pegawai disebuah organisasi yang berkaitan dengan loyalitas, keterlibatan dengan organisasi, usaha maksimal dalam melaksanakan tugas dan lain sebagainya. Jika sumber daya memiliki komitmen organisasi yang tinggi diharapkan dapat membantu menghasilkan laporan keuangan yang andal dan tepat waktu. Dengan mengetahui tentang visi misi organisasi, dan tujuan dari sasaran pekerjaan dapat mengarahkan pegawai untuk bekerja dengan baik yang pada akhirnya dapat mewujudkan tujuan organisasi".

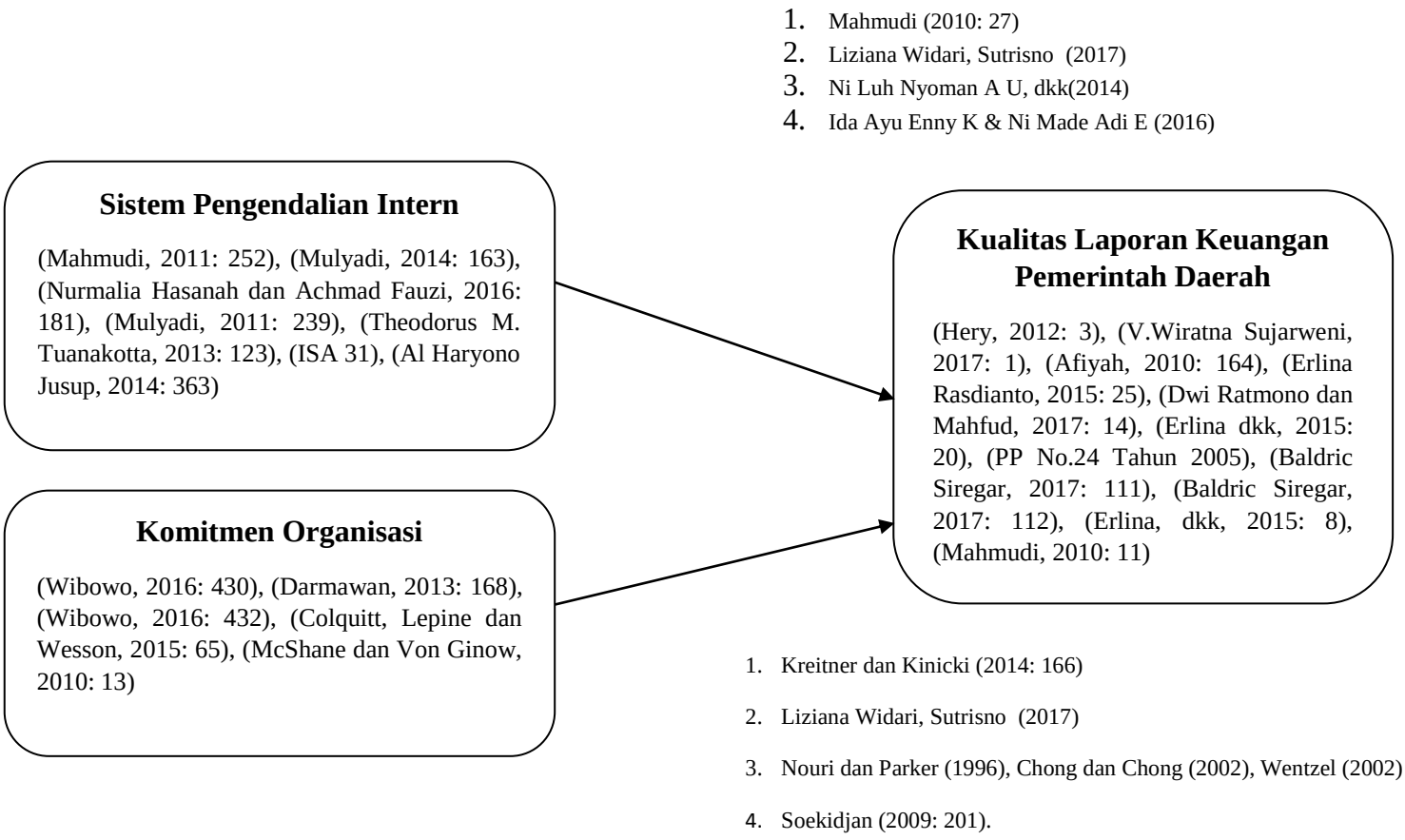
Pada konteks pemerintahan, aparat yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi, akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk menyusun laporan keuangan menjadi relatif lebih tepat. Selain itu, komitmen organisasi dapat

merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian kinerja yang diharapkan (Nouri dan Parker, 1996; Chong dan Chong, 2002; Wentzel, 2002). Dengan adanya komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang *reliable* sesuai dengan SAP.

Hal ini sejalan dengan penelitian menurut Liziana Widari dan Sutrisno (2017) mengemukakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, artinya semakin baik komitmen organisasi maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah".

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikiran dari penelitian ini dalam bentuk paradigma penelitian sebagai berikut:

PARADIGMA PENELITIAN



Gambar 2.1

Gambar Paradigma Penelitian

2.2 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas suatu hubungan, sebab akibat dari kinerja variabel yang perlu dibuktikan (Hamid, 2012: 26). Perumusan hipotesis pada penelitian ini berdasarkan teori dan penelitian-penelitian terdahulu yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

H_1: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H_2: Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.